

# **P**EDOMAN PENGOLAHAN PROGRAM IP PADI 300 SPESIFIK LOKASI DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN UNGARAN  
INSTALASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YOGYAKARTA  
PROYEK PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN/ARMP-II  
YOGYAKARTA  
2000

## KATA PENGANTAR

Menghadapi situasi tahun yang akan mendatang seperti kondisi iklim tahun 1997 dimana terjadi kemarau kering panjang yang diakibatkan oleh El-Nino dan tahun 1998 terjadi basah panjang akibat terjadi La-Nina, perlu upaya antisipatif jangka pendek dan jangka panjang guna menghindari krisis pangan dimasa yang akan datang. Ramalan akan adanya gejala La-Nina yang menyebabkan penanaman palawija mempunyai risiko gagal yang besar, karena tingginya curah hujan dan jeleknya drainase pada lahan sawah.

Seperti kasus yang dialami tahun 1998, masih banyak petani kita yang secara naluri atau atas dorongan pemerintah yang tetap bertahan untuk menanam palawija, walaupun risiko gagal lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kita belum siap menghadapi perubahan iklim, dan ini dapat memperbesar risiko krisis pangan dimasa depan, terutama karena kecenderungan penyimpangan alam yang terjadi semakin ekstrim dan kering.

Adanya fenomena El-Ninó dan La-Nina merupakan pelajaran penting bagi kita. Oleh karena itu IPPTP Yogyakarta menyusun Pedoman Pengelolaan Program IP Padi-300 Spesifik Lokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif cara pemecahan masalah penyimpangan iklim dimasa mendatang. Saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

Yogyakarta, Agustus 2000



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>II. PERENCANAAN</b> .....	3
A. Penentuan Calon Lokasi .....	3
B. Penentuan Calon Petani (PCP) .....	5
<b>III. PENGORGANISASIAN</b> .....	8
A. Tingkat Kelompok Tani .....	8
B. Tingkat Petugas Lapangan .....	8
C. Tingkat kabupaten .....	9
D. Tingkat Propinsi .....	10
<b>IV. PENGKOORDINASIAN</b> .....	11
A. Antar Petani dalam Satu Kelompok .....	11
B. Antar Petugas Lapangan dengan Petani .....	12
C. Antar Petugas Lapangan dengan Petugas kabupaten .....	13
D. Antar Petugas Daerah dengan Petugas Wilayah .	14
<b>V. MEKANISME KERJA</b> .....	15
A. Pendataan Calon Lokasi dan Calon Petani .....	15
B. Penyusunan RDKK .....	15
C. Pelaksanaan KUT .....	17
D. Pengadaan dan Penyampaian Sarana Produksi .....	17
E. Operasional Kegiatan .....	18
<b>VI. PENGAWASAN</b> .....	19

<b>VII. PERSIAPAN KEGIATAN</b> .....	20
A. Identifikasi dan Implementasi Inovasi Tekno- logi IP Padi-300 .....	20
B. Langkah Operasional IP Padi-300 .....	21
<b>VIII. PELAKSANAAN PROGRAM IP PADI-300</b> .....	22
A. Apresiasi dan Sosialisasi Program .....	22
B. Karakterisasi Lokasi dan Petani .....	26
C. Paket Teknologi .....	28
D. Sarana Produksi dan Permodalan (KUT) .....	35
<b>IX. PENYUSUNAN DATA BASE PRODUKSI PANGAN</b> ..	39
<b>X. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b> .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	40

## I. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan produksi padi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama diarahkan dengan peningkatan produktivitas tanaman dengan cara peningkatan mutu intensifikasi mengingat bahwa penambahan areal sawah (ekstensifikasi) rasanya sudah tidak mungkin lagi. Namun demikian penambahan areal tanam padi masih ada peluang untuk ditingkatkan dengan cara pengaturan tata tanam, pola tanam, dan penggunaan varietas padi berumur pendek. dengan demikian diharapkan akan terjadi peluang peningkatan frekuensi tanam padi pada periode tertentu sehingga membuka peluang untuk menambah luas panen padi pada periode tertentu.

Pada akhir-akhir ini kita telah merasakan telah terjadinya fenomena **La-Nina** pada tahun lalu yang berakibat terjadinya curah hujan dan hari hujan diatas normal. Sebagai akibatnya pola pergiliran tanaman yang sudah disepakati oleh kelompok tani yaitu dalam setahun bertanam padi dua kali dan palawija sekali tidak dapat dilaksanakan. Namun apabila dipaksakan untuk tanam palawija justru petani akan mengalami kerugian.

Berangkat dari kondisi alam yang tidak cocok untuk bertanam palawija tersebut terpaksa petani diarahkan menanam padi tiga kali berturut-turut dalam satu tahun meskipun pola seperti ini dalam kondisi normatif tidak dianjurkan. Sebagai realisasinya pada tahun 1998 pola tersebut telah dicanangkan sebagai program IP Padi-300 dari Badan Litbang Pertanian.

Oleh karena itu, bila ditahun-tahun mendatang kondisi iklim seperti tahun 1997 kering panjang akibat terjadinya El-Nino, dan tahun 1998 basah panjang akibat terjadi La-Nina, maka program IP Padi-300 perlu untuk dicanangkan. Namun demikian sangat diharapkan kiranya harus dipersiapkan dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat berhasil lebih baik dan tidak ada yang merasa dirugikan akibat salah dalam menggunakan teknologi yang diterapkan.

Berikut ini kami sampaikan Pedoman Pengelolaan IP Padi-300 spesifik lokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan di lapangan bila sewaktu-waktu terjadi penyimpangan iklim yang tidak kita inginkan. Saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan, demi penyempurnaan buku ini.

## II. PERENCANAAN

### A. Penentuan Calon Lokasi

#### 1. Rencana Indikatif

Merujuk panduan : Inovasi Teknologi IP Padi-300 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian mengisyaratkan bahwa lahan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan program IP Padi-300 adalah lahan yang memiliki durasi ketersediaan air dalam 10 bulan, sehingga dengan pedoman tersebut kiranya dapat dilakukan pemetaan wilayah kelompok (bulak) yang dihimpun dari masing-masing desa dengan memperhatikan sumber air, daerah irigasi mana, waktu tanam (kebiasaan petani setempat), varietas yang ditanam, keserempakan tanam dan kemungkinan untuk dapat dilaksanakan program IP Padi-300 di wilayah kelompok tersebut. Himpunan data kelompok perdesa tersebut sangat dibutuhkan bagi para penyuluh pertanian sebagai data indikatif untuk dibawa dalam forum konsultasi dengan perangkat desa setempat.

Data indikatif dari kelompok-kelompok tersebut setidaknya-tidaknya sudah dimiliki oleh petugas lapangan sekitar delapan minggu sebelum waktu sebar tanaman padi kemarau (bhs. Jawa = ketigo), (H-8) lebih kurang pada awal bulan Juni.

## **2. Rencana Konsultatif**

Atas dasar indikatif tersebut para petugas lapangan sesuai dengan wilayah binaan khususnya membawa rencana tersebut untuk dikonsultasikan dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta pertimbangannya. Pihak yang terkait tersebut antara lain kadus/kaur ekbang desa, petugas pengairan setempat, ketua kelompok tani setempat dan KTNA tingkat kecamatan. Pertimbangan tersebut meliputi ketersediaan air, keserempakan tanam, kesiapan kelompok dalam upaya penanggulangan/ pengendalian hama/ penyakit, tenaga kerja alat pengolahan, tenaga tanam untuk mendukung tertib tanam dan respon kelompok tani terhadap anjuran teknologi IP Padi-300 yang akan diterapkan.

## **3. Rencana Definitif**

Hasil dari konsultasi tersebut akhirnya akan diperoleh calon kelompok-kelompok tani yang betul-betul memenuhi syarat untuk melaksanakan program IP Padi-300 setidaknya sudah melalui tahapan seleksi dari berbagai pihak yang memiliki peranan dalam proses produksi. Selanjutnya dari data kelompok yang lolos seleksi tersebut segera ditindak lanjuti untuk mendata lebih lanjut tentang luas tanam, jumlah petani pemilik penggarap, penggarap, rencana sebar dan varietas yang ditanam. Data tersebut dapat dipakai sebagai bahan awal dalam perencanaan, yang nantinya akan dibawa dalam musyawarah tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat



kabupaten dalam rangka mempersiapkan sarana produksi seperti pupuk, benih, KUT, sehingga dapat melayani petani secara tepat; tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat tempat, tepat jumlah dan tepat harga.

## **B. Penentuan Calon Petani (PCP)**

### **1. Pertemuan Petani Tingkat Kelompok**

Atas dasar rencana definitif kelompok yang telah diperoleh dengan tahapan konsultasi baik ditingkat desa maupun ditingkat kelompok tani tersebut perlu segera ditindak lanjuti pertemuan-pertemuan ditingkat petani dengan koordinasi desa dan penyuluh setempat. Koordinasi kepala desa dan PPL setempat diperlukan untuk mengatur jadwal pertemuan perkelompok agar dapat berjalan lancar dan tidak berbenturan waktu.

Materi yang perlu diangkat dan dibahas dalam pertemuan kelompok tersebut adalah sebagai berikut; (1) wilayah dan luas lahan; (2) kepengurusan/peningkatan aktivitas pengurus kelompok, pembagian tugas pengurus; (3) identifikasi/inventarisasi sarana/prasarana yang mendukung kegiatan intensifikasi antara lain: ketersediaan air, tenaga kerja, traktor, tenaga tanam, kios TPK, kios saprodi dan lain-lain; (4) rencana varietas padi yang akan ditanam; (5) rencana sebar, rencana tanam; (6) rencana pengolahan lahan; (7) fungsi kelompok terhadap pengimbangan; (8) evaluasi terhadap penerapan teknologi produksi dan produktivitas yang diperoleh pada musim tanam yang lalu; (9) perbaikan teknologi/rencana penerapan teknologi yang akan diterapkan pada

musim tanam yang akan datang; (10) rencana penyusunan RDKK; (11) rencana pengkajian, petak pengalaman, demplot yang akan datang.

Pertemuan tingkat kelompok tersebut setidaknya-tidaknya dapat dilaksanakan pada H - 6 (enam minggu sebelum sebar).

## **2. Pertemuan Petani Tingkat Desa**

Musyawarah antar kelompok tani se-desa pelaksana IP Padi-300 diperlukan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah operasional sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antar kelompok tani. Pertemuan tersebut justru diharapkan akan dapat memperlancar dan memperkuat peranan kelompok saling mendukung dan saling membantu.

dalam musyawarah kelompok tani perdesa tersebut perlu inventarisasi dan pendataan masalah sebagai berikut: (1) luas areal, tanam dari masing-masing kelompok tani; (2) varietas yang ditanam; (3) waktu sebar, pengolahan lahan dan tanam dari masing-masing kelompok; (4) ketersediaan sarana/prasarana usahatani; (5) ketersediaan tenaga kerja; (6) peluang kerjasama dalam pemasaran, pengadaan sarana produksi; (7) kesiapan RDKK dan rekapitulasi RDKK; (8) kesepakatan pengelolaan TPK; (9) kesepakatan pengambilan KUT dan pengembalian KUT; (10) penerapan/pengesahan sanksi kelompok oleh kepala desa terhadap petani-petani yang melanggar kesepakatan.

Pertemuan tingkat desa ini setidaknya-tidaknya harus sudah dapat dilaksanakan pada H-5 (lima minggu sebelum sebar benih).

### **3. Pertemuan Petani Tingkat kecamatan**

Pertemuan petani/pengurus kelompok tani tingkat kecamatan untuk membahas permasalahan, menggunakan persepsi maupun menetapkan kegiatan yang ruang lingkupnya harus diangkat ditingkat kecamatan. Materi-materi yang diangkat dalam tingkat kecamatan antara lain : (1) penataan/pengaturan penggunaan air irigasi; (2) kesepakatan gerakan pembersihan irigasi; (3) kesepakatan persiapan/pengolahan lahan, waktu sebar dan waktu tanam dari masing-masing desa disesuaikan dengan kemampuan air maupun kebiasaan petani; (4) kesepakatan dalam penggunaan varietas maupun pergiliran varietas; (5) kesepakatan kerjasama antara kelompok/antar desa dalam wilayah kecamatan dalam berbagai kegiatan usahatani; (6) kesepakatan tentang ketentuan harga sarana produksi dan jasa/fee pupuk bagi kelompok tani maupun TPK (7) rekapitulasi RDKK, jumlah kebutuhan pupuk, benih dan sarana produksi yang lain; (8) kesepakatan pengukuran produksi (ubinan), target ubinan tiap kelompok/luasan tertentu; (9) temu lapang, kompetisi/lomba produksi dalam rangka menggairahkan semangat petani (bila perlu); (10) gerakan pengendalian hama dan penyakit.

Pertemuan pengurus kelompok tani tingkat kecamatan ini setidaknya-tidaknya dapat dilaksanakan H-5 (lima minggu sebelum waktu sebar).

### **III. PENGORGANISASIAN**

#### **A. Tingkat Kelompok Tani**

Untuk mendukung suksesnya program IP Padi-300 ditingkat kelompok tani wajib memiliki kepengurusan yang aktif, memiliki seksi-seksi yang dapat mengakomodasikan semua kebutuhan dalam menjamin terlaksananya program.

Standar minimal yang harus dimiliki oleh kelompok tani pelaksana program IP Padi-300 seperti halnya dalam organisasi Supra Insus adalah sebagai berikut: (1) ketua, sekretaris, bendahara; (2) seksi-seksi : seksi sarana produksi, pengolahan lahan, pengairan; (3) penataan sebar, tanam; (4) pengendalian hama/penyakit; (5) panen, pasca panen dan pemasaran.

Disamping seksi tersebut dalam rangka kontrol dan kelancaran penyusunan , sarana produksi diterapkan sistem Dasa Tani. Setiap lebih kurang 10-12 orang diketuai oleh seorang petani yang dipilih oleh mereka dan dapat bertindak atas nama mereka misalnya dalam penyusunan RDKK, menerima paket kredit maupun dalam rapat-rapat koordinasi.

#### **B. Tingkat Petugas Lapangan**

Organisasi petugas ditingkat lapangan akan sangat menentukan ketepatan dan kelancaran pelaksanaan program IP Padi-300, karena ditangan merekalah yang paling mengetahui tentang data dan fakta wilayah yang mengikuti program IP Padi-300.

Agar tidak menambah organisasi di lapangan Tim Sukses program IP Padi-300 melekat pada satuan pelaksana tugas kecamatan dimana struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Ketua : Camat

Sekretaris : Sekretaris Penggerak Satpel Bimas kecamatan

Anggota : PPL, Mantri Tani, Pengairan, Koperasi, Kades, Kaur. Ek. Bang, KTNA kecamatan dan Instansi/lembaga lain yang dipandang perlu.

Organisasi ditingkat lapangan ini bertugas mempersiapkan, mengakomodasikan, bimbingan, supervisi, laporan, evaluasi serta usul dan saran tingkat kabupaten dalam rangka suksesnya program IP Padi-300 diwilayah kerjanya.

### **C. Tingkat kabupaten**

Sebagaimana organisasi ditingkat kecamatan, organisasi ditingkat kabupaten sebaiknya juga memanfaatkan organisasi Satuan Pelaksana Harian Bimas kabupaten dengan penugasan khusus kepada instansi/lembaga yang dipandang tepat untuk menduduki jabatan organisasi sesuai dengan fungsinya. Memperhatikan pedoman/panduan dari pusat serta belajar dari pengalaman pelaksanaan IP Padi-300 pada tahun 1998, susunan organisasi pelaksana IP Padi-300 ditingkat kabupaten adalah sebagai berikut :



- Ketua** : Ketua Harian Satpel Bimas kabupaten (Asek II Sekwilda)  
**Ketua Harian** : Kepala Dinas Pertanian  
**Sekretaris** : I. Kepala BIPP  
                   II. SPH Bimas kabupaten  
**Anggota** : - Kakandep Koperasi  
                   - BRI  
                   - PT Pusri  
                   - PT. Pertani  
                   - P. U. Pengairan  
                   - KTNA Tk. kabupaten

#### **D. Tingkat Propinsi**

Sebagaimana organisasi ditingkat kabupaten maupun kecamatan, organisasi ditingkat propinsi juga memanfaatkan organisasi Satuan Pembina Harian Bimas yang telah ada dan memfungsikan lembaga/dinas instansi yang banyak berperan dalam mendukung program IP Padi-300.

Adapun susunan organisasi ditingkat propinsi adalah sebagai berikut:

- Ketua Harian** : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan  
**Sekretaris I** : Kepala IPPTP  
**Sekretaris II** : Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi D.I. Yogyakarta  
**Anggota** : Dinas-dinas terkait antara lain: Kanwil BI, BRI, Bukopin, Kanwil Koperasi, Dinas Pengairan/DPU, PT Pusri, PT Pertani, BPSB, BPTPH, dll.

## **IV. PENGKOORDINASIAN**

### **A. Antar Petani dalam Satu Kelompok**

Koordinasi antar petani dalam satu kelompok memegang peranan penting dalam menciptakan "suasana yang kondusif", kompak dan menggairahkan dalam kehidupan berkelompok. Untuk menciptakan suasana tersebut perlu adanya kesepakatan yang diputuskan lewat musyawarah dan mufakat. Untuk menciptakan musyawarah tersebut kelompok tani harus menyelenggarakan rapat/ pertemuan setidaknya-tidaknya setiap bulan sekali, bila dipandang perlu dapat dua minggu sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi.

Materi koordinasi adalah membahas berbagai masalah dan upaya pemecahannya dalam kegiatan usaha tani sejak dari persiapan, pelaksanaan, panen, pasca panen, evaluasi maupun pemanenan yang akan datang.

Dalam koordinasi tersebut agar dilandasi dengan semangat kebersamaan, rasa tanggung jawab disiplin pengurus/anggota dan diperankan secara optimal fungsi-fungsi pengurus/seksi-seksi yang telah dibentuk.

Kesimpulan maupun kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah mufakat hendaknya dibuat secara tertulis dalam notulen/kesepakatan rapat dan disebar luaskan kepada seluruh anggota maupun pihak-pihak yang terkait dengan hasil kesimpulan/kesepakatan tersebut.

Konsep "Dasa Tani" dimana setiap 10 orang diketuai oleh satu orang sebagai wakil mereka kiranya dapat dipergunakan/sebagai jembatan untuk menyebar luaskan hasil kesepakatan/kesimpulan dan sebaliknya akan dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan inspirasi dari bawah (anggota) untuk disampaikan kepada pengurus kelompok. dengan demikian bagi kelompok tani yang belum membentuk "Dasa Tani" perlu dibentuk dan ditumbuhkan.

## **B. Antar Petugas Lapangan dengan Petani**

Koordinasi antar petugas lapangan dimotori oleh PPL koordinasi/sekretaris penggerak bimbingan masal. Koordinasi ini diperlakukan agar pelaksanaan kegiatan lapangan dapat berjalan lancar. Materi yang perlu diangkat dalam koordinasi tersebut antara lain :

- Persiapan/kesiapan kelompok tani untuk memperoleh pelayanan sarana produksi baik dengan KUT maupun dengan swadana.
- Upaya melakukan bimbingan penerapan teknologi produksi, pasca panen, pemasaran.
- Pengamatan hama/penyakit tanaman dan upaya pengendaliannya
- Evaluasi produksi dan pendapatan usahatani dengan melakukan ubinan/panenan maupun wawancara kepada petani.
- Perencanaan kelompok tani dalam rangka memperbaiki kegiatan-kegiatan pada musim tanam berikutnya.

Peran penyuluh pertanian/pembina wilayah binaan khusus sangat penting untuk dapat mengangkat masalah-masalah yang riil yang terjadi di lapangan untuk dibawa dalam forum koordinasi, untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada kelompok tani lewat penyuluh pertanian setempat.

Koordinasi ini agar dapat dilakukan bersama petugas terkait antara lain: pengairan, koperasi, kades, pedagang dan lain-lain, paling tidak setiap dua minggu sekali atau kapan saja dipandang perlu.

### **C. Antar Petugas Lapangan dengan Petugas kabupaten**

Koordinasi tingkat kabupaten dengan para petugas lapang diperlukan paling tidak setiap bulan sekali. Materi yang perlu diangkat dalam koordinasi tersebut antara lain;

- Masalah- masalah yang terjadi ditingkat lapang yang belum dapat dipecahkan.
- Petunjuk/informasi yang diterbitkan ditingkat propinsi atau tingkat pusat
- Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pengaturan harga, pelayanan sarana produksi, KUT dan ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya merupakan kebijakan ditingkat kabupaten.
- Laporan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai di masing-masing BPP/kecamatan.
- Saran-saran dari lapangan untuk memperbaiki/ pelaksanaan intensifikasi dan lain-lain.

## **D. Antar Petugas Daerah dengan Petugas Wilayah**

Koordinasi ditingkat propinsi antara petugas tingkat propinsi dengan petugas tingkat dua diharapkan dapat dilaksanakan paling tidak satu bulan sekali. Agenda pertemuan yang perlu diangkat dalam pertemuan tersebut antara lain;

- Berbagai masalah yang terjadi ditingkat dua yang belum mampu dipecahkan.
- Berbagai kegiatan yang memerlukan dari dukungan tingkat satu misalnya pengaturan air/pembagian air.
- Penyebaran/pemahaman petunjuk-petunjuk dari tingkat pusat.
- Laporan hasil/pelaksanaan ditingkat lapangan.
- dan lain-lain



## **V. MEKANISME KERJA**

### **A. Pendataan Calon Lokasi dan Calon Petani**

Atas dasar rencana definitif yang telah disusun, data calon lokasi dan calon lokasi hendaknya sudah dapat tersusun paling tidak pada H-6 (enam minggu sebelum sebar).

Pendataan calon lokasi tersebut agar dilaksanakan para PPL pembina wilayah khusus dan direkap oleh pimpinan BPP setempat selanjutnya ditindak lanjuti penyusunan RDKK.

### **B. Penyusunan RDKK**

Penyusunan RDKK hendaknya segera dilaksanakan, lebih awal lebih baik sehingga tidak terjadi keterlambatan dan dapat mendukung perencanaan yang lebih awal sehingga unsur pelayanan dapat mempersiapkan lebih dini sesuai permintaan dari lapangan.

Penyusunan RDKK hendaknya sekaligus dapat diagendakan pada saat pertemuan kelompok tani sebagaimana kegiatan dalam pertemuan petani tingkat kelompok.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RDKK tersebut antara lain :

- Setiap kelompok sebaiknya dapat menyelenggarakan rapat sendiri dalam rangka penyusunan RDKK.

- Untuk lebih memudahkan penyusunan RDKK diharapkan agar dibentuk sistem "Dasa Tani" dimana setiap  $\pm 10$  orang dapat diwakili oleh satu orang sebagai penanggung jawab dalam pengajuan KUT, penerimaan KUT, pembagian sarana produksi dan pengembalian kredit.
- Angka-angka luas areal/luas garapan agar disepakati untuk dibulatkan sehingga memudahkan perhitungan penggunaan sarana produksi, angka terakhir dibawah 50 dibulatkan ke bawah, angka terakhir diatas 50 dibulatkan ke atas.  
Contoh :  $1.840 \text{ m}^2$  menjadi  $1.800 \text{ m}^2$   
 $1.875 \text{ m}^2$  menjadi  $1.900 \text{ m}^2$
- dalam pembagian pupuk/saprodi ditingkat "Dasa Tani" agar dapat disepakati bagaimana memecahkan masalah penyusutan akibat penimbangan secara eceran, misalnya setiap satu kilogram disusut  $0,05 \text{ kg}$  ( $0,5 \text{ ons}$ ) dengan catatan bahwa penyusutan tersebut telah disepakati oleh anggota Dasa Tani.
- dalam penyusunan RDKK perkelompok tersebut sebaiknya ditarget dalam waktu 1-3 hari sudah selesai.
- PPL pembina wilayah khusus wajib untuk cek terhadap isi RDKK yang dipandang meragukan, bila perlu dicroscek dengan Ketua RT atau Kadus setempat sehingga dapat menjamin kebenaran RDKK yang tersusun.
- RDKK tersebut hendaknya sudah siap H-5 (lima minggu sebelum sebar).

### **C. Pelaksanaan KUT**

RDKK yang telah tersusun sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan harus disampaikan kepada koperasi penyalur/KUD dimana koperasi tersebut sebagai penyalur saprodi/kredit dari kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya antara kelompok tani dengan koperasi/KUD hendaknya sudah ada kesepakatan kapan sarana produksi tersebut akan didrop, didrop di TPK mana, siapa penanggung jawabnya harus sudah disepakati sejak awal.

### **D. Pengadaan dan Penyampaian Sarana Produksi**

Pengadaan saprodi bagi kelompok tani yang tidak melalui KUT biasanya membeli sendiri-sendiri secara swadaya sedang kelompok tani yang mengambil KUT biasanya sarana produksinya disiapkan oleh koperasi/KUD penyalur dimana RDKK tersebut diserahkan kepada mereka, selanjutnya terhadap sarana produksi yang tidak mampu disiapkan oleh koperasi/KUD yang bersangkutan hendaknya dapat diterimakan berujud uang sehingga kelompok tani dapat mencari sendiri sesuai dengan keinginan mereka.

Ditargetkan agar sarana produksi tersebut baik KUT maupun non KUT sudah dapat diterima oleh petani paling lambat H-1 (satu minggu sebelum sebar), sehingga setelah saprodi tersebut didrop di TPK/ dipengurus kelompok, harus segera dibagikan kepada anggotanya lewat pengurus "Dasa Tani".

## **E. Operasional Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan usahatani program IP Padi-300 merupakan rentetan kegiatan sejak pendataan kelompok, penyusunan RDKK, penerimaan/pembagian KUT dan atau sarana produksi, pengolahan lahan, persemaian, pemeliharaan, panen, pasca panen dan pemasaran.

Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terprogram sebaiknya kelompok tani mau/mampu menyusun jadwal dan disertai langkah yang riil dan disiplin sehingga jadwal yang telah disusun tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Jadwal yang tersusun tersebut hendaknya dikonsultasikan dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut baik dari unsur penyuluhan, pelayanan maupun pengaturan.

## **VI. PENGAWASAN**

Pengawasan terhadap kegiatan IP Padi-300 agar dapat dilaksanakan lewat supervisi dan monitoring. Supervisi dan monitoring dapat dilaksanakan lewat rapat, kunjungan lapang, maupun konsultasi dengan para pelaku-pelaku program.

Pelaksanaan supervisi/ monitoring dapat dilaksanakan secara bertahap dan atau langsung kepada obyek yang dikehendaki baik ditingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun kelompok (lapangan).



## **VII. PERSIAPAN KEGIATAN**

### **A. Identifikasi dan Implementasi Inovasi Teknologi IP Padi-300**

#### **1. Faktor Penunjang**

- Potensi sumberdaya alam yang tersedia dan memungkinkan untuk ditanami padi lagi.
- Jumlah petani sebagai produsen usahatani padi misalnya seluas 3.000 ha sebanyak  $\pm$  9.000 orang.
- Tersedianya paket teknologi spesifik yang siap untuk direkomendasikan.
- Peluang untuk pemasaran hasil padi masih terbuka.
- Koordinasi yang mantap dengan dinas terkait (Dinas, BIPP, Kelompok Tani dsb).

#### **2. Faktor Penghambat**

- Benih bermutu kemungkinan besar kurang tersedia terutama untuk pergiliran varietas pada MH berikutnya.
- Ramalan akan adanya curah hujan yang tinggi dan pengaruh La-Nina yang beriklim basah yang diperkirakan akan adanya banjir.
- Adanya beberapa organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menonjol di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: tikus, penggerek batang padi, wereng batang coklat, walang sangit dan tungro.
- Mutu gabah dan beras yang rendah dan pemasaran yang kurang lancar akibat panen di musim hujan.

## **B. Langkah Operasional IP Padi-300**

- Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan penunjang IP Padi-300.
- Melaksanakan pergiliran varietas tahan hama dan penyakit serta aplikasi penggunaan pestisida.
- Inventarisasi lokasi-lokasi rawan banjir.
- Penerapan teknologi Alsintan dalam menunjang kegiatan olah tanah, tanam, panen dan pasca panen.
- Koordinasi yang mantap dengan pengusaha benih (PT. Pertani, Perum Sang Hyang Seri, Penangkar Benih, dsb), dalam penyediaan benih bermutu.
- Koordinasi dengan instansi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hama/penyakit, panen dan pasca panen serta evaluasi hasil.

## **VIII. PELAKSANAAN PROGRAM IP PADI-300**

### **A. Apresiasi dan Sosialisasi Program**

#### **1. Organisasi**

Program IP Padi-300 tahap I di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diawali kunjungan Tim Pusat Badan Litbang Pertanian pada bulan Mei 1998. Tim pusat menginformasikan kepada Kanwil Deptan, Dinas Pertanian Tk. I, SPH-Bimas, Kanwil Pekerjaan Umum, BPSB, PT. Pertani, Dolog dan instansi terkait lainnya tentang akan adanya program IP Padi-300 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan program IP Padi-300 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketuai langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Wakil Ketuaanya SPH-Bimas dan Sekretarisnya Kepala IPPTP Yogyakarta sebagai pelaksana harian.

Langkah kebijaksanaan dalam memperlan-car distribusi saprodi (pupuk, benih dan obat-obatan) dikoordinasikan dalam suatu pertemuan rutin 1 – 2 minggu sekali oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan kepada instansi terkait. Peran BRI, PT. Pertani, Dinas Pertanian Tk. II, Camat, BIPP dalam hal penyusunan RDK dan RDKK guna memperoleh KUT sangat menonjol. Disamping itu peranan P.U. Pengairan dalam mengatasi dan mengatur ketersediaan air sangat menentukan.

dalam pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh peneliti selaku Koordinator Penelitian dan sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan. Bekerjasama dengan BIPP, pelaksana kegiatan dilakukan oleh para peneliti dan penyuluh yang ada di IPPTP maupun di BIPP. Ditempatkan beberapa orang peneliti, penyuluh sebagai tenaga detasering yang secara rutin melakukan pengawalan teknologi secara ketat dan melakukan kegiatan pengamatan/ pengukuran lapang.

## **2. Pelatihan dan Sistem Pengawalan Teknologi**

Agar pelaksanaan program IP Padi-300 dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan tenaga peneliti, penyuluh, dan teknisi lapang yang terampil dan mampu dalam menangani krisis produksi padi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu dilakukan sistem pelatihan (TOT) dan pengawalan teknologi guna menunjang kegiatan di lapangan.

Apresiasi pelatihan untuk menunjang program IP Padi-300 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan di tingkat propinsi maupun kabupaten. Sedangkan praktek dan kunjungan lapangan (*field trips*) diselenggarakan di wilayah kecamatan dengan salah satu obyek cara pengendalian OPT, misalnya tikus dengan sistem TBS.

Peserta TOT seluruhnya berjumlah 50 orang yang terdiri atas 25 orang penyuluh pertanian sarjana dan para koordinator PPL di wilayah pengembangan program IP Padi-300 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditambah sejumlah pejabat dari daerah Tk II yang terkait dengan program IP Padi-300.

#### a. Pelatihan

Materi-materi pelatihan :(1). Pengarahan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan TK. I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Keragaan Produksi Padi; (2). Pengarahan Pembina Pusat tentang kebijakan Program IP Padi-300 tingkat nasional; (3). Penjelasan dan Gambaran Umum tentang program IP Padi-300; (4). Pola Tanam, TOT dan Walik Jerami Pada Sistem Usahatani Padi Sawah; (5). Perbaikan Varietas Padi Unggul Baru; (6). Beberapa Jenis Gulma Penting Padi Sawah dan Cara Pengendaliannya; (7). Teknologi Pengendalian Wereng Coklat Terpadu; (8). Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Tungro-Wereng Hijau Pada Padi Sawah IP Padi-300; (9). Pengendalian Hama Tikus Padi Sawah; (10). Kehilangan Hasil Padi dan Cara Pencegahannya; (11). Kunjungan Lapangan berupa peragaan penangkapan tikus sawah dengan sistem TBS. Kegiatan tersebut khususnya no (3) sampai dengan no (11) dipandu langsung oleh para peneliti dari Balitpa Sukamandi dan IPPTP.



## **b. Pengawasan Teknologi**

Akibat fenomena iklim yakni terjadinya El-Nino diperkirakan produksi padi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan turun. Oleh karena itu diperlukan upaya terobosan yang bersifat *business unusual* yang mampu meningkatkan Indeks Per-tanaman padi menjadi 3 kali tanam dan 3 kali panen dalam setahun atau IP Padi-300. Diperlukan penyuluhan dan bimbingan secara terpadu dalam menggerakkan petani untuk menerapkan teknologi, agar penerapannya dapat terkendalikan. Selain itu, peranan pemanfaatan KUT oleh petani dalam program IP Padi-300 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsekuen. dengan demikian, penerapan teknologi dapat dikendalikan yang pada akhirnya keberhasilan program dapat dicapai.

dalam pelaksanaan bimbingan teknologi, perlu diadakan pertemuan ditingkat kabupaten yang dihadiri oleh para pejabat terkait, masing-masing pejabat menyampaikan secara oral kepada forum tentang beberapa masalah yang perlu untuk ditangani.

## **B. Karakteristik Lokasi dan Petani**

### **1. Lokasi**

Penetapan lokasi IP Padi-300 berdasarkan identifikasi dan konsultasi dengan petugas pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan sehingga didapatkan calon lokasi secara definitif. Lokasi berada pada pengairan setengah teknis dari selokan Van Der Wijk dan aliran sungai Winongo, Bedog, Progo, Opak, Code, dan lain-lain.

### **2. Petani**

Petani pelaksana IP Padi-300 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya petani kecil dengan kepemilikan garapan kurang dari 1.000 m<sup>2</sup> jumlahnya melebihi dari 60%, sebagian antara 1.000 – 2.000 m<sup>2</sup>, dan sebagian kecil ± 5 % melebihi 2.000 m<sup>2</sup>. Garapan diatas 1 ha umumnya sawah bengkok yang dimiliki oleh pamong desa.

Selain sebagai petani padi, umumnya juga menanam palawija, memelihara ternak ayam buras dan sebagian memelihara ternak kambing/ternak besar. Sebagai contoh beberapa petani di kecamatan Minggir, Godean dan Moyudan, di kabupaten Sleman, kecamatan Sewon, Kasihan dan Sedayu di kabupaten Bantul umumnya juga sebagai pegawai negeri.

### **3. Pola Tanam Existing Petani**

Pola tanam yang ada di kabupaten Sleman umumnya padi-padi-padi dan padi-padi-palawija. Untuk kabupaten Bantul pola tanam diatur dengan SK Bupati yang mengatur pola tanam dengan padi-padi-palawija atau padi-palawija-padi, dan pada pertengahan bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus tidak boleh ada tanaman padi.

Untuk kabupaten Sleman IP Padi diterapkan pada areal cukup air dengan pola tanam padi-padi-padi, yang sebelumnya menanam dengan varietas umur panjang antara lain Cisedane. Di dalam pelaksanaan IP Padi-300 diganti dengan varietas umur pendek, antara lain IR-64, Memberamo, Way Apo Buru, Cirata, dan lain-lain. Di kabupaten Bantul diterapkan pada daerah dengan pola tanam padi-padi-palawija digeser dengan pola padi-padi-padi.

## C. Paket Teknologi

### 1. Introduksi

- **Varietas Unggul Baru**

Varietas unggul baru (VUB) yang diintroduksi pada program IP Padi-300 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain VUB yang telah lama dikenal oleh masyarakat tani seperti IR-64 adalah varietas-varietas padi unggul baru sebagai pendamping IR-64 diantaranya adalah Way Apo Buru, Towuti, Memberamo, Cirata dsb. Varietas ini memiliki sifat yang hampir menyerupai IR-64 kecuali Cirata, sehingga oleh masyarakat tani langsung dapat diterima. Umur yang relatif pendek menjadi prasyarat dalam introduksi varietas unggul baru ini untuk dapat diprogramkan dalam IP Padi-300.

- **Sistem Pengolahan Tanah**

dalam mengantisipasi singkatnya waktu persiapan tanam pada pelaksanaan program IP Padi-300 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sistem pengolahan tanah dalam waktu singkat dikerahkan alat pengolah tanah (traktor) secara masal. Pada sistem olah tanah berat dalam waktu singkat mutlak diperlukan alat-alat mekanisasi pertanian seperti traktor tangan dengan singkal dan rotari yang dikerjakan siang dan malam, sehingga

dalam waktu yang relatif singkat yaitu antara 3 – 5 hari lahan sudah siap tanam. Sedangkan beberapa petani yang masih tersedia tenaga temak, pengolahan dengan menggunakan temak dan dilakukan secara sempurna.

- **Sistem Pertanaman**

Sistem pertanaman yang diintroduksi pada pelaksanaan program IP Padi-300 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sistem tanam pindah dengan pesemaian pendahuluan ("*ngrowok*") dan sistem Tanam Benih Langsung (Tabela). Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi singkatnya waktu persiapan tanam agar dapat dicapai indeks pertanaman 3 kali panen dalam satu tahun (IP Padi-300).

- **Sistem Panen dan Pasca Panen**

Panen padi diintroduksi dengan sistem panen beregu dengan mekanisasi alat mesin pertanian terutama untuk perontok gabah bermotor (*power thresher*). Hal ini dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan waktu panen dan pasca panen.

## • Sistem Pemupukan

Sistem pemupukan berimbang dengan dosis anjuran berdasarkan rekomendasi regional dimana seluruh lahan pertanaman padi dianggap sebagai suatu lahan yang seragam, kurang sesuai bagi daerah tertentu yang memiliki spesifikasi khusus. Oleh karena itu, sistem pemupukan berimbang spesifik lokasi yang didasarkan pada hasil analisis tanah setempat dipandang sebagai salah satu alternatif pilihan dalam menentukan rekomendasi pemupukan yang lebih efektif dan efisien.

Penggunaan pupuk fosfat seperti TSP yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif lama pada lahan sawah, akan menyebabkan lahan menjadi jenuh fosfat yang mengakibatkan pemupukan fosfat pada lahan tersebut menjadi kurang efektif dan efisien. Akibat lain dari penjumlahan fosfat di lahan sawah adalah akan memperdalam lapisan lumpur sehingga hara tanaman yang berada didekat lapisan kedapnya tidak terjangkau oleh perakaran tanaman padi yang relatif dangkal. Sistem Tabela yang tanamannya tidak mengalami *stagnasi* pertumbuhan dan pemotongan akar, merupakan jawaban untuk mengantisipasi keadaan ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor diperoleh informasi bahwa rekomendasi pemupukan spesifik lokasi dapat didasarkan atas analisis tanah terhadap kandungan unsur K (kalium) dan P (fosfat) potensial sebagai berikut (Tabel 1).

Sedangkan untuk penentuan rekomendasi pemupukan unsur nitrogen (N) didasarkan atas kebutuhan nitrogen optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan varietas padi yang digunakan (Tabel 2).

Tabel 1. Dasar umum rekomendasi pemupukan spesifik lokasi

Unsur Hara	Hasil Analisa Tanah di Laboratorium	Status P/K tanah	Pemberian SP-36 (kg/ha)	Pemberian KCl (kg/ha)
P dan K	< 20 mg/100 g	Rendah	100 – 150	100 – 150
	20 - 40 mg/100 g	Sedang	50 – 100	100
	> 40 mg/100g	Tinggi	50	100

Sumber : Anonimus (1996)

Waktu dan cara pemupukan tergantung pada sistem tanam yang diterapkan. Untuk sistem tanam pindah dan legowo seperti yang biasa dilakukan oleh petani selama ini sedangkan khusus untuk sistem Tabela, waktu pelaksanaan pemupukan untuk pupuk

dasar yang terdiri atas ZA, TSP/SP36 dan KCl diberikan pada saat umur tanaman mencapai 7 hari setelah pelaksanaan penebaran benih. Sedangkan untuk pupuk susulan yang terdiri hanya Urea tablet diberikan pada saat tanaman berumur 21 hari setelah pelaksanaan penebaran benih.

Tabel 2. Dasar rekomendasi pemupukan spesifik lokasi untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Anonimus, 1999)

Lokasi	Pupuk Urea*		Pupuk SP-36		Pupuk KCl	
	Varietas	Rekomendasi (kg/ha)	P.Potensial ppm	Rekomendasi (kg/ha)	K. Potensial (ppm)	Rekomendasi (kg/ha)
Bantul	VUB	187,50-225	86,00	50,00	31,40	50 - 75
Sleman	VUB	187,50-225	88,63	50,00	32,73	50 - 75

Keterangan: \* = Urea Tablet

VUB = Varietas padi unggul baru (IR-64, Memberamo, Cirata, Towuti, Way Apo Buru, dan Widias)



## 2. Teknologi Petani

- **Varietas Unggul**

Varietas unggul yang digunakan dan disenangi petani diantaranya adalah varietas yang telah lama dikenal oleh masyarakat tani seperti IR-64, Cisedane, Way Seputih. Varietas ini telah terlalu lama digunakan dan tidak dengan pergiliran varietas oleh petani sehingga sangat rawan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu seperti wereng dan tungro.

- **Sistem Pengolahan Tanah**

Sistem pengolahan tanah dengan tenggang waktu yang cukup lama (*"dayung"*) antara panen dan persiapan tanam telah terbiasa dilaksanakan oleh petani sehingga tidak mungkin dapat mencapai IP Padi-300, sebab diperlukan tenggang waktu antara 30 – 40 hari untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami, sambil menunggu umur bibit yang cukup dipesemaian. Pengolahan dengan menggunakan traktor tangan, bajak dengan tenaga ternak dan sebagian menggunakan cangkul.

- **Sistem Pertanaman**

Sistem pertanaman yang biasa digunakan petani adalah sistem tanam pindah dengan umur bibit di pesemaian antara 25 – 35 hari. Hal

ini dimaksudkan untuk menunggu sistem "dayung" pada pengolahan tanah. dengan sistem seperti ini, indek pertanaman 3 kali panen dalam satu tahun (IP Padi-300) tidak mungkin dapat dicapai.

- **Sistem Panen dan Pasca Panen**

Panen padi umumnya dilaksanakan secara individual, dengan peralatan yang sangat sederhana yaitu ketam, sabit biasa dan bergerigi untuk pemungutan hasil. Sedangkan untuk perontokannya ada yang menggunakan cara digebot ataupun dengan diiles. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kehilangan hasil panen.

- **Sistem Pemupukan**

Sistem pemupukan yang dilakukan oleh petani masih jauh dari sistem pemupukan berimbang dengan dosis anjuran berdasarkan rekomendasi regional. Kebanyakan petani hanya memupuk padi dengan urea dan TSP/SP-36 sedangkan pupuk KCl hampir tidak pernah diberikan. Akibat dari sistem pemupukan seperti ini produktivitas padi tidak dapat ditingkatkan. Penggunaan pupuk fosfat seperti TSP yang dilakukan secara terus menerus oleh petani dalam jangka waktu yang relatif lama pada lahan sawah, akan menyebabkan lahan menjadi jenuh fosfat yang mengakibatkan lahan tersebut menjadi

kurang efektif dan efisien. Akibat lain dari penjenjuran fosfat di lahan sawah adalah akan memperdalam lapisan lumpur sehingga hara tanaman yang berada di dekat lapisan kedapnya tidak terjangkau oleh perakaran tanaman padi yang relatif dangkal. Akibat tidak berimbangya sistem pemupukan oleh petani, maka tanaman padi akan sangat rawan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman.

#### **D. Sarana Produksi dan Permodalan (KUT)**

Sarana produksi yang meliputi benih, pupuk dan pestisida untuk pelaksanaan intensifikasi padi pada umumnya dan IP Padi-300 pada khususnya tidak mengalami kesulitan karena selain disediakan oleh KUD juga tersedia di kios swasta maupun kios kelompok tani.

Kredit KUT yang disediakan oleh BRI cukup banyak, untuk tahun 1998/1999 disediakan plafon kredit sebesar 129 milyar rupiah untuk KUT padi dan palawija se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. KUT untuk petani pelaksana IP Padi-300 sangat menarik karena disediakan subsidi untuk pupuk KCI. Harga pupuk KCI di pasar bebas sebesar Rp. 2.000,-/kg sedang untuk KUT hanya sebesar Rp. 850,-/kg pada tahun 1998.

## 1. Pengadaan Sarana Produksi

Dapat melalui Kredit Usaha Tani (KUT) yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seperti benih, pupuk, herbisida dan obat-obatan lainnya. Penyusunan RDK/RDKK dilakukan bersama antara kepala desa, kelompok tani dan PPL. Untuk memperlancar penyaluran KUT ke petani dikenal sistem *Chanelling* dan *Executing*, perbedaannya KUD berperan sebagai pencatat dan kelompok tani aktif pada sistem *chanelling* dan KUD aktif pada program *executing*. Fee pupuk pada sistem *chanelling* diberikan lebih banyak ke kelompok tani daripada ke KUD setelah pelunasan KUT. Prosedur penyaluran pupuk dari KUD ke petani disajikan pada Gambar 1.

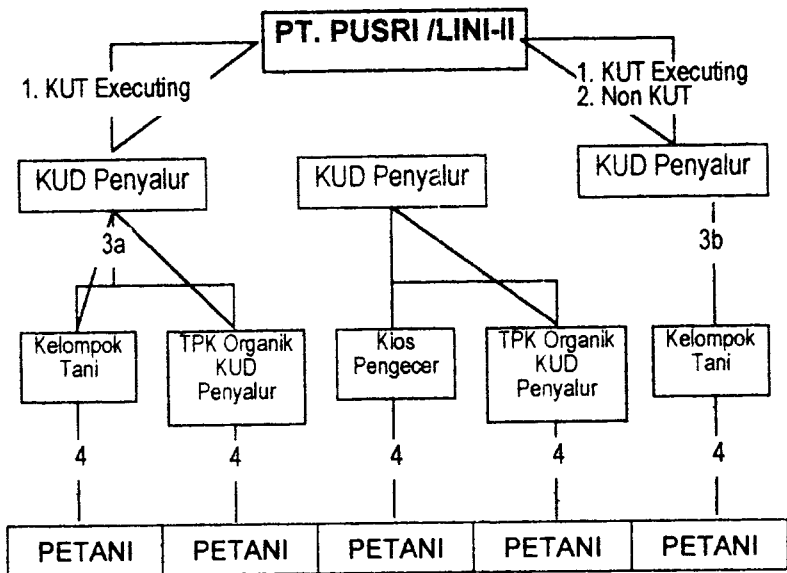
## 2. Masukan Teknologi Budidaya IP Padi-300 dan Kelembagaan

Dapat berupa benih unggul baru, sistem tanam, pemupukan berimbang, pemberantasan hama dan penyakit terpadu (SPHT), dan pasca panen. Sistem tanam dapat dilakukan dengan menggunakan: Tabela, Tapin, Tanam Jajar Legowo (Tajarwo), Tanpa Olah Tanah (TOT), Gogo Rancah dan Mina Padi. Pengendalian hama dan penyakit dapat menggunakan Sistem Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu

(SPHT). Panen dilakukan pada umur panen optimum dengan sabit bergerigi sedangkan penanganan pasca panen dengan memanfaatkan fasilitas unit penggilingan KUD/desa atau RMU setempat. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam keterlibatan mereka dilakukan pelatihan, temu teknis, temu lapang secara periodik. Perlu disiapkan Posko IP Padi-300 sebagai sumber komunikasi, informasi dan konsultasi baik di kabupaten, kecamatan dan desa serta UHP.

### **3. Tenaga Detasering**

Terdiri dari peneliti, penyuluh dan teknisi yang bersifat multi disiplin dengan beberapa tugas antara lain: (a) membantu menyusun RDK/RDCK; (b) menyusun pola tanam; (c) melakukan penyuluhan/ pelatihan/ pembimbingan petani peserta dalam penerapan teknologi; (d) melaksanakan koordinasi/ konsultasi dengan pihak-pihak terkait; (e) monitoring perkembangan IP Padi-300 dilapangan dan; (f) melaksanakan kegiatan Super Imposed Trial serta melakukan pengamatan dan pengukuran dalam memperoleh data penelitian.



Gambar 1. Penyaluran pupuk dari KUD ke Petani, sistem KUT dan non KUT

**Keterangan :**

1. KUD penyalur menerima pupuk KUT dari PT Pusri yang telah dicairkan dari BRI.
2. Pupuk non KUT dibeli dari PT Pusri oleh KUD penyalur langsung disalurkan ke TPK KUD atau pengecer pupuk swasta.
3. a. KUD menyalurkan KUT ke kelompok tani dengan sistem Executing.  
b. KUD menyalurkan KUT ke kelompok tani dengan sistem Chanelling

## **IX. PENYUSUNAN DATA BASE PRODUKSI PANGAN**

Selama kegiatan IP Padi-300 diupayakan untuk dapat menghasilkan data yang akurat tentang informasi yang terjadi di lapangan. Beberapa data yang dimaksudkan adalah data hasil IP Padi 300, pola ketersediaan lahan, lokasi, areal, analisis ekonomi, teknologi untuk pengembangan selanjutnya, analisis dinamika kelompok tani, dinamika kelembagaan keragaan usahatani serta data lain yang di pandang terkait dengan kegiatan dan yang sangat diperlukan. Farm Record Keeping diperlukan dalam setiap kegiatan IP Padi-300 untuk melakukan data di lapangan.

## **X. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Tingkat keberhasilan program IP Padi-300 dapat dipantau dari kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan oleh tim komisi pengkajian dan tim teknis pengkajian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kabupaten, kecamatan, Desa dan kelompok tani. Hasil-hasil dari pemantauan sebaiknya dilaporkan setiap dua mingguan, bulanan, dan triwulan secara berkala dan intensif. Sedangkan evaluasi dilakukan setiap bulan semua dengan jadwal palang operasional

## PUSTAKA

- Anonimus, 1996. Laporan Teknis SUTPA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 27 hal.
- Anonimus, 1998. Panduan Inovasi Teknologi IP Padi-300. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian, Juli 1998. 52 hal.
- Anonimus, 1998. Langkah Operasional SUP Padi MH 1998/1999 di Jawa tengah. Raker Badan Litbang Pertanian, tgl. 12 – 13 Agustus 1998, Yogyakarta. 5 hal.
- Anonimus, 1999. Laporan teknis program IP Padi-300 Proipinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 99 hal.
- Mangkey, A, 1998. Langkah Operasional Pelaksanaan Sup MH. 1998/1999 di Propinsi Sulawesi Utara, Raker Badan Litbang Pertanian, tgl. 12 – 13 Agustus 1998, Yogyakarta. 24 hal.
- Mudjasihono, R, 1997. Bahan rekomendasi tanam benih langsung (Tabela). Disampaikan pada pertemuan koordinasi intensifikasi nasional SESDAL – BIMAS, tgl. 13 – 16 Juli 1997, Semarang. 21 hal.